

Dampak Penataan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kualasimpang

Putri Sabrina¹, Nurlina², Salman Syarief³

^{1,2,3}Universitas Samudra, Indonesia

E-mail: putrisabrina961@gmail.com¹, nurlina@unsam.ac.id², salman@unsam.ac.id³

Article History:

Received: 21 November 2025

Revised: 30 Desember 2025

Accepted: 15 Januari 2026

Keywords: Pedagang Kaki Lima, Penataan Lingkungan, Dampak Sosial, Dampak Ekonomi, Relokasi

Abstract: Penelitian ini menganalisis dampak sosial dan ekonomi penataan lingkungan bagi 100 PKL yang direlokasi di Kualasimpang. Hasilnya, 88,2% responden merasakan peningkatan rasa aman, ketertiban berjualan, dan hubungan harmonis antar-PKL, serta peningkatan keindahan dan kebersihan lingkungan. Secara ekonomi, 87,57% setuju penataan memicu kenaikan pendapatan dan volume penjualan karena akses yang lebih mudah, meski ada biaya adaptasi awal. Secara keseluruhan, penataan meningkatkan kesejahteraan pedagang. Secara sosial, penataan menciptakan rasa aman, ketertiban dalam berjualan, hubungan harmonis antar pedagang, serta meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungan yang pada gilirannya menambah kenyamanan masyarakat sekitar. Secara ekonomi, penataan mendorong peningkatan pendapatan dan volume penjualan pedagang karena akses konsumen yang lebih mudah dan distribusi barang yang lancar. Namun, penelitian juga mencatat adanya tantangan seperti biaya adaptasi awal dan kecenderungan beberapa PKL untuk kembali ke lokasi awal

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) berperan penting dalam ekonomi informal Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sulit dipenuhi sektor formal (Hanum et al., 2024). Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi ketat, keterbatasan akses data, serta minimnya keterampilan manajerial. Penataan lingkungan bagi PKL penting dalam ekonomi perkotaan untuk mendukung kelangsungan usaha sekaligus mengatasi masalah ketertiban, kemacetan, dan kebersihan di lokasi strategis berdagang (Alisyahbana, 2014)

Keberadaan PKL juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 (Kepdirjen 438/KN/2020) menekankan pentingnya analisis manfaat dan dampak ekonomi serta sosial dari suatu objek atau kegiatan. Dalam konteks ini, PKL berpotensi mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sari et al., 2021). Namun, persaingan dengan pedagang formal sering kali menjadi tantangan yang perlu diatasi agar tidak menghambat perkembangan sektor perdagangan lainnya (Sianipar et al., 2020). Oleh sebab itu, perbaikan lingkungan bagi PKL sangat penting

dilakukan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka (Yadewani et al., 2020).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penataan dan relokasi PKL memiliki dampak yang kompleks, tidak hanya pada aspek ekonomi seperti pendapatan dan volume penjualan, namun juga aspek sosial seperti keteraturan, keamanan, dan hubungan sosial antar sesama pedagang. Studi oleh (Hanum et al., 2024) menemukan bahwa penataan PKL dapat meningkatkan keteraturan kota dan aksesibilitas ruang publik, mempererat hubungan sosial antar pedagang, dan membantu stabilitas usaha PKL malam. Namun, hasil penelitian lain (Setiawan et al., 2022), dan (Putri Pratiwi et al., 2022) menunjukkan perbedaan dampak bergantung pada karakteristik lokasi relokasi dan fasilitas penunjang yang tersedia.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, aktivitas PKL tersebar luas, salah satunya di Jl. Nyak Umar, Kota Kualasimpang. Berdasarkan observasi peneliti, banyak PKL memanfaatkan alun-alun, trotoar, dan ruang publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan sangat dibutuhkan untuk menertibkan PKL di wilayah tersebut. Relokasi PKL ke Jl. Panglima Polem No.7, RW.11, Kota Kualasimpang, yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi kemacetan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kebijakan relokasi ini dinilai belum berhasil. Banyak PKL yang telah direlokasi dari Jl. Nyak Umar ke Jl. Panglima Polem kini kembali ke lokasi awal. Saat ini, jumlah PKL di Jl. Panglima Polem semakin berkurang, sementara Jl. Nyak Umar kembali dipadati PKL. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menata lingkungan kota masih menghadapi berbagai kendala.

Gap pada penelitian ini yaitu Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menitikberatkan pada dampak penataan dan relokasi PKL di berbagai daerah dengan fokus pada efektivitas kebijakan dalam meningkatkan keteraturan kota, pengurangan kemacetan, serta dampak sosial dan ekonomi secara umum. Namun, belum ada penelitian di kabupaten aceh tamiang. Selain itu, penelitian ini menonjolkan pentingnya aspek partisipasi PKL dalam proses relokasi dan penataan, serta pengaruh karakteristik lokasi terhadap keberhasilan penataan, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi terdahulu.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana dampak sosial penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima di Kualasimpang?, dan bagaimana dampak ekonomi penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima di Kualasimpang? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima di Kualasimpang.

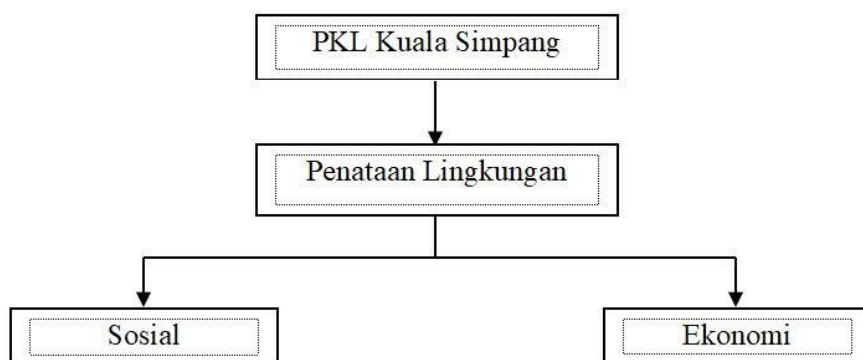
LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang diartikan sebagai wadah yang mencakup daratan, lautan, udara, hingga ruang di dalam bumi yang menjadi satu kesatuan wilayah untuk menunjang aktivitas serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sementara itu, wilayah dipahami sebagai suatu tempat atau area yang memiliki dimensi luas dan isi yang menjadi tempat kedudukan (Prasetya & Luluk, 2012). Penataan ruang merupakan suatu sistem yang mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian terhadap penggunaan ruang

Menurut (Suryana, 2015) PKL merupakan pelaku usaha dengan keterbatasan modal yang menjajakan barang atau jasa kepada segmen konsumen tertentu di area yang dinilai strategis, dalam suasana yang tidak sepenuhnya formal. (Alisyahbana, 2014) Pedagang kaki lima merupakan individu yang menjalankan usaha skala kecil tanpa izin resmi, dengan memanfaatkan area seperti trotoar atau tepi jalan sebagai tempat berdagang. (Prasetya & Luluk, 2012)

menjelaskan konsep pedagang kaki lima digunakan untuk menggambarkan penjual yang biasanya menggunakan gerobak dalam menjalankan usahanya.

Menurut Suranto dalam (Dewi et al., 2023) menyatakan bahwa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan suatu proyek memang dirancang untuk mendorong peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga secara teoritis setiap proyek seharusnya memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat di tingkat lokal, provinsi, nasional, bahkan internasional. beberapa unsur yang dipandang krusial dalam menentukan aspek sosial ekonomi yaitu pola perkembangan penduduk, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, berkembangnya struktur ekonomi

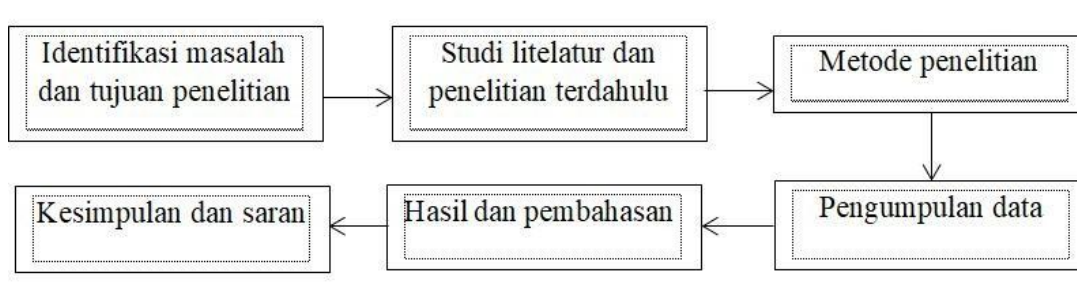


Gambar 1. Skema Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Jl. Nyak Umar dan Jl. Panglima Polem Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penataan lingkungan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kualasimpang. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden PKL yang telah direlokasi sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan instrumen kuesioner yang kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi penghitungan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh para PKL. Metode ini dipilih agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait bagaimana penataan lingkungan berpengaruh terhadap keteraturan sosial, keamanan, serta pendapatan dan kesejahteraan ekonomi PKL. Teknik analisis statistik ini mengacu pada penelitian-penelitian sejenis dan diharapkan mampu memberikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di Kualasimpang yang berjumlah 2923 orang pada tahun 2023 (Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang). Berdasarkan rumus Slovin, dapat diketahui jumlah sampel minimal adalah 96,69. Dengan demikian, sampel pada penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden



Gambar 2. Alur penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (mean), tertinggi (max), terendah (min) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu dampak sosial (X1) dan dampak ekonomi (X2). Mengenai hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	16	45	39.68	3.803
X2	100	18	45	39.45	3.445
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah (2025)

Variabel dampak sosial (X1) dengan jumlah total responden 100, memiliki nilai minimum sebesar 16, kemudian nilai maximum sebesar 45, nilai mean sebesar 39.68 dan standar deviation sebesar 3.803. Variabel dampak ekonomi (X2) dengan jumlah total responden 100, memiliki nilai minimum sebesar 18, kemudian nilai maximum sebesar 45, nilai mean sebesar 39.45 dan standar deviation sebesar 3.445 Hal ini menunjukkan bahwa penataan lingkungan memberikan dampak signifikan dan relatif konsisten di antara responden PKL di Kualasimpang

Hasil ini sejalan dengan konsep penataan ruang dan pembangunan sosial ekonomi yang menegaskan bahwa perencanaan ruang harus mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prasetya & Luluk, 2012),(Lia et al., 2023). Penataan PKL yang memberikan rasa aman, keteraturan, dan aksesibilitas didukung oleh literatur yang menekankan pentingnya manajemen ruang dan peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah.

2. Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan secara statistik dengan *person correlation*. Instrumen kuesioner dikatakan valid apabila nilai signifikansi (sig.) < 0,05, yang menunjukkan bahwa butir pertanyaan dalam kuesioner memiliki hubungan yang signifikan dengan total skor. Jumlah data yang digunakan dalam pengujian validitas ini berasal dari 100 responden (n = 100), yang dianggap cukup untuk memperoleh hasil pengujian yang representatif.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Dampak Sosial

Item Variabel	r-hitung	r-tabel	Sig	Hasil
X1.1	0.688	0.1966	0,000	Valid
X1.2	0.745	0.1966	0,000	Valid
X1.3	0.738	0.1966	0,000	Valid
X1.4	0.753	0.1966	0,000	Valid
X1.5	0.536	0.1966	0,000	Valid
X1.6	0.664	0.1966	0,000	Valid
X1.7	0.492	0.1966	0,000	Valid
X1.8	0.642	0.1966	0,000	Valid
X1.9	0.677	0.1966	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel dampak sosial dinyatakan valid dalam uji validitas setelah melalui proses olah data statistik melalui *IBM SPSS Statistics*23. Kuesioner dinyatakan valid karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ dimana $r \text{ tabel}$ adalah 0.1966 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Dampak Ekonomi

Item Variabel	r-hitung	r-tabel	Sig	Hasil
X2.1	0.637	0.1966	0,000	Valid
X2.2	0.758	0.1966	0,000	Valid
X2.3	0.640	0.1966	0,000	Valid
X2.4	0.615	0.1966	0,000	Valid
X2.5	0.648	0.1966	0,000	Valid
X2.6	0.665	0.1966	0,000	Valid
X2.7	0.572	0.1966	0,000	Valid
X2.8	0.728	0.1966	0,000	Valid
X2.9	0.463	0.1966	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel dampak ekonomi dinyatakan valid dalam uji validitas setelah melalui proses olah data statistic melalui *IBM SPSS Statistics*23.

3. Uji Reliabilitas

Jika nilai *Cronbach alpha* $> 0,60$ maka dinyatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach alpha* $< 0,60$, maka dinyatakan tidak reliabel

Tabel 3. Uji Reliabilitas

No	Item	Banyak Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Dampak Sosial	9	0.841	Reliabel
2.	Dampak Ekonomi	9	0.815	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa semua nilai pada item pernyataan variabel dampak sosial, dampak ekonomi dan penataan lingkungan dapat dinyatakan reliable atau reliabilitas diterima dan sangat tinggi karena nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$. dengan demikian, nilai pada setiap variabel dalam penelitian ini dapat dipercaya dan konsisten pada hasilnya.

Dampak Sosial Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kualasimpang

1. Pemerintah mendukung Pengembangan Usaha Para PKL
Berdasarkan penilaian angket pada indikator dukungan pemerintah dengan skor 433 kemudian dibagi 500 (skor maksimal), rerata skor 0,866 dan persentase 86,6% artinya responden merasa sangat setuju. Pemerintah mendukung pengembangan usaha pedagang kaki lima, antara lain melalui relokasi dari lokasi yang semrawut dan rawan kemacetan ke area usaha yang legal dan terpadu. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Suryana, 2015), dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha PKL terlihat setelah relokasi, di mana pemerintah tidak hanya melakukan penertiban kota, tetapi juga membina dan memberdayakan PKL agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan dan lebih kompetitif.
2. Relokasi Pedagang Kaki Lima Mengurangi Kemacetan di Jalan
Pada indikator ini diperoleh skor 448, sehingga rerata skor 0,896 atau persentase 89,6% yang artinya responden merasa sangat setuju. Penempatan PKL di zona khusus memungkinkan pelanggan yang menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas tanpa mengganggu arus lalu lintas, sehingga mengurangi titik-titik kemacetan dan meningkatkan kelancaran mobilitas warga. Temuan ini diperkuat oleh (Suryana, 2015) kebijakan relokasi PKL ke Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) oleh Pemerintah Kota Probolinggo mampu menciptakan ruang berjualan yang lebih tertata serta mengurangi kemacetan di pusat kota melalui penataan zona khusus yang terintegrasi dengan kawasan wisata.
3. Relokasi Pedagang Kaki Lima Tidak Menimbulkan Kecemburuan Sesama Pedagang
Skor untuk indikator ini adalah 444, menghasilkan rerata skor 0,888 (88,8%) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa relokasi yang dirancang transparan dengan kuota pedagang yang jelas, biaya retribusi yang rendah, dan saling mengetahui mereka sama-sama berdagang dengan izin yang legal, mampu meminimalkan kecemburuan di antara para PKL. Temuan sejalan dengan (Supriatna, 2019) pasca relokasi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran membentuk tim khusus untuk mencegah kecemburuan sosial dengan memastikan hanya pedagang asongan berizin yang dapat berjualan di area tertentu, sementara pedagang yang telah mendapat kios dilarang kembali berjualan di sembarang tempat.
4. Relokasi Pedagang Kaki Lima Menghasilkan Ketertiban dalam Berdagang
Dengan skor 441 dan rerata 0,882 (88,2%) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Penataan lapak yang tertib, penomoran lokasi, dan pengaturan jam operasional mendorong PKL untuk berjualan secara tertib. Temuan ini diperkuat oleh (Prasetya & Luluk, 2012) pasca relokasi, pedagang merasa aktivitas mereka menjadi lebih tertib dan aman, sehingga tidak mengganggu keindahan dan keteraturan kota.
5. Relokasi Pedagang Kaki Lima Menciptakan Keamanan Lokasi Usaha
Indikator ini memperoleh skor 442, atau rerata 0,884 (88,4%) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Keamanan tersebut didukung oleh adanya pengawasan petugas serta lingkungan yang bebas dari pungutan liar oleh oknum tertentu. Kondisi ini tidak hanya melindungi pedagang dari potensi kriminalitas, tetapi juga menciptakan kenyamanan bagi para pembeli. Temuan ini diperkuat oleh (Karuniawan et al., 2016) pedagang merasa lebih aman dan nyaman melakukan aktivitas di lokasi relokasi karena adanya jaminan ketertiban dan keamanan dari pengelola.
6. Relokasi Pedagang Kaki Lima Menjaga Kestabilan Sosial
Dengan skor 441 rerata skor 0,882 dan persentase 88,2% yang menunjukkan bahwa

responden sangat setuju. Penataan PKL melalui zonasi yang jelas, izin yang legal, dan pengawasan yang terkoordinasi, mengurangi potensi konflik antarwarga yang biasanya timbul akibat pedagang berjualan di trotoar atau badan jalan. Temuan ini diperkuat oleh (Aotama & Klavert, 2021), Aspek-aspek seperti kepastian dan jaminan hukum, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, persaingan sehat, serta hubungan sosial antar pedagang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi di lokasi sebelumnya.

7. Relokasi Pedagang Kaki Lima Meningkatkan Keindahan Kota

Pada indikator keindahan kota, skor yang diperoleh adalah 432, dengan rerata 0,864 (86,4%) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari lokasi yang kerap menimbulkan kemacetan dan dipenuhi sampah berhasil memperindah pemandangan kota. Temuan ini didukung oleh (Sasoko & Boangmanalu, 2024) Kawasan yang sebelumnya penuh sampah dan kemacetan kini menjadi lebih bersih dan teratur berkat fasilitas sanitasi yang memadai dan pengelolaan limbah yang baik.

8. Relokasi Pedagang Kaki Lima Membuat Pembeli Mudah Menjangkau Lokasi

Indikator aksesibilitas lokasi meraih skor 441, rerata 0,882 (88,2%) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Aksesibilitas yang baik ini dapat meningkatkan frekuensi kunjungan pembeli serta memudahkan mereka menjangkau lokasi. Penelitian (Ulva et al., 2024) menyatakan aksesibilitas merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan lokasi berdagang bagi PKL. Selain aksesibilitas, faktor lain seperti fasilitas publik, sarana prasarana, ketersediaan parkir, kedekatan dengan permukiman.

9. Relokasi Pedagang Kaki Lima Membuat Tenang Suasana Kota

Dengan skor 447, rerata 0,894 (89,4%) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Penataan lingkungan yang terorganisir mengurangi kebisingan akibat lapak yang berdesakan di pinggir jalan, menurunkan kepadatan pejalan kaki di jalur kendaraan, serta mengurangi kemacetan. Temuan ini diperkuat oleh (Sianipar et al., 2020) aktivitas PKL yang tidak teratur dapat mengganggu ruang bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor, sehingga mengurangi kenyamanan dan keindahan kota.

Dampak Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kualasimpang

1. Relokasi pedagang kaki lima memudahkan konsumen dalam memperoleh barang

Hasil penilaian angket pada indikator ini didapati skor 431 dari skor maksimal 500, dengan rerata skor 0,862 dan persentase 86,2% yang artinya responden sangat setuju. Relokasi PKL ke lokasi yang lebih tertata memudahkan konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Temuan ini diperkuat oleh (Setiaji & Fatuniah, 2018) Penempatan PKL di lokasi yang rapi dan mudah dijangkau memperbesar peluang transaksi, karena konsumen merasa lebih terbantu dan nyaman saat berbelanja.

2. Relokasi pedagang kaki lima memudahkan konsumen menjangkau beberapa lokasi pedagang

Skor pada indikator ini juga sebesar 431, sehingga rerata skor 0,862 dan persentase 86,2% yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Penempatan PKL dalam zona terpusat yang berjejer di sepanjang lokasi relokasi memudahkan konsumen mengunjungi banyak lapak dagangan sekaligus tanpa harus berpindah-pindah. Temuan ini diperkuat oleh (Utomo et al., 2022) pemusatan PKL dalam satu zona ekonomi memudahkan aksesibilitas konsumen dan meningkatkan kualitas interaksi sosial di ruang publik.

3. Relokasi pedagang kaki lima membuka potensi penambahan variasi produk dagangan

Pada indikator ini diperoleh skor 438 (rerata skor 0,876; persentase 87,6%) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Lingkungan berdagang yang lebih ramai dan aksesibilitas yang baik mendorong pedagang menambah variasi produk guna memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas dan beragam. Hasil ini sejalan dengan (Ramadhan & Asriwandari, 2025) keberadaan PKL masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah.

4. Relokasi pedagang kaki lima meningkatkan kuantitas penjualan produk

Indikator ini meraih skor 449 dari 500, sehingga rerata skor 0,898 dan persentase 89,8% yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Penataan lokasi yang strategis, kelancaran alur keluar-masuk kendaraan pelanggan, dan diperbolehkannya pedagang menggelar lapak dengan meja bagi pembeli mendorong lebih banyak konsumen datang. Temuan ini diperkuat oleh (Dewi et al., 2023), Semakin strategis lokasi berjualan, semakin besar peluang untuk menarik konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan produk.

5. Relokasi pedagang kaki lima meningkatkan aktivitas ekonomi

Skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 445, menghasilkan rerata skor 0,890 dan persentase 89,0% yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Aktivitas jual-beli menjadi lebih intens, interaksi antara pedagang dan konsumen meningkat, serta permintaan akan berbagai jasa pendukung (angkutan, logistik, hingga jasa kebersihan) turut bertumbuh, menciptakan sirkulasi uang yang lebih dinamis. Temuan ini diperkuat oleh (Dewi et al., 2023) tujuan kebijakan pemukiman PKL oleh pemerintah provinsi adalah menciptakan kawasan yang aman, nyaman, tenteram, dan sejahtera.

6. Relokasi pedagang kaki lima membuat distribusi barang menjadi lancar

Dengan skor 441, rerata skor 0,882 dan persentase 88,2% yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Relokasi ke lokasi yang memiliki akses kendaraan dan minim kemacetan membuat proses pengiriman stok dagangan menjadi lebih lancar. Penelitian (Dewi et al., 2023), Peningkatan infrastruktur ini memungkinkan interaksi antar pedagang tetap terjaga dan menciptakan peluang ekonomi baru.

7. Relokasi pedagang kaki lima meningkatkan persaingan usaha yang sehat

Indikator ini memperoleh skor 428, dengan rerata skor 0,856 dan persentase 85,6% yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Penataan lapak yang teratur, lokasi dagang yang sudah ditentukan, sehingga tidak menyalahgunakan lapak dagangan orang lain, membantu meminimalkan praktik persaingan tidak sehat sehingga pedagang dapat bersaing secara berkualitas dan profesional. Penelitian (Tasya et al., 2022) relokasi tidak mengubah keharmonisan hubungan antar pedagang.

8. Relokasi pedagang kaki lima telah meningkatkan pendapatan pedagang

Pada indikator peningkatan pendapatan, skor yang dicatat adalah 434, dengan rerata skor 0,868 dan persentase 86,8% yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Penempatan lapak di titik yang lebih strategis memicu lebih banyak kunjungan konsumen, peningkatan volume penjualan, dan pada akhirnya menaikkan tingkat omset harian pedagang. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Dewi et al., 2023) yang menunjukkan bahwa 71% pedagang mengalami peningkatan pendapatan setelah direlokasi.

9. Relokasi pedagang kaki lima meningkatkan kesejahteraan pedagang

Indikator meningkatkan kesejahteraan pedagang meraih skor 444 dari 500, sehingga rerata skor 0,888 dan persentase 88,8% yang menunjukkan bahwa responden

sangat setuju. Relokasi tidak hanya berdampak pada aspek material (pendapatan) tetapi juga aspek non-material yang mendukung kesejahteraan, seperti kenyamanan berjualan, rasa aman bebas dari pungli, dan persaingan usaha yang sehat. Temuan ini diperkuat oleh (Dewi et al., 2023), kebijakan penataan ulang lokasi berdagang, bila dirancang dengan baik, dapat mendorong kesejahteraan ekonomi pelaku usaha kecil secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kualasimpang, dapat disimpulkan bahwa penataan lingkungan memberikan dampak positif yang signifikan baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Secara sosial, penataan menciptakan rasa aman, ketertiban dalam berjualan, hubungan harmonis antar pedagang, serta meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungan yang pada gilirannya menambah kenyamanan masyarakat sekitar. Secara ekonomi, penataan mendorong peningkatan pendapatan dan volume penjualan pedagang karena akses konsumen yang lebih mudah dan distribusi barang yang lancar. Namun, penelitian juga mencatat adanya tantangan seperti biaya adaptasi awal dan kecenderungan beberapa PKL untuk kembali ke lokasi awal. Secara teoritis, hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam penataan PKL agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan keterlibatan PKL dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penataan, disertai penyediaan fasilitas pendukung yang memadai untuk meminimalkan dampak biaya adaptasi dan meningkatkan keberhasilan relokasi. Pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan program pembinaan dan pemberdayaan yang terus berkelanjutan agar PKL mampu beradaptasi dengan lokasi baru serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Pendekatan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata PKL serta masyarakat akan meningkatkan efektivitas penataan lingkungan di daerah perkotaan seperti Kualasimpang.

DAFTAR REFERENSI

- Alisyahbana. (2014). *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Yudhistira.
- Christian Aotama, R., & Rosaline Henny Klavert, D. (2021). Social Impact of Relocation on Street Vendors in Tomohon Culinary Tourism Site. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1)
- Dewi, A. P., Intan, Y., Dari, W., Astuti, D. Y., Aeni, N., Wulandari, N., Gennosa, C. P., Adilla, W., Alaida, E., Pamungkas, F. Y., & Saharuddin, E. (2023). *Analisis dampak sosial ekonomi akibat relokasi pedagang kaki lima di Malioboro*. 1, 7–15.
- Fadlilah, M., Rahma, N., Azizah, A., & Khoiriawati, N. (2024). Eksplorasi Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Di Era Digital Maulida. *Musytari*, 5(7), 12–26. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/3324>
- Hanum, F., Sarboini, Yana, S., Nelly, Mauliza, P., & Juwita. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Perekonomian*. Mega Nusantara.
- Karuniawan, M. H., Sukma, A. P. S., & Kurniawan, E. D. (2016). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo). *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699.
- Lia, N., Agung, S., & Megawati, D. (2023). Model Pengembangan Kreativitas Dan Inovasi Dalam Era Ekonomi Digital (Studi Kasus L.Fashion.Id). *Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 566–577. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>
- Prasetya, A. M., & Luluk, F. (2012). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jkmp*, 135–150.

- Puspita Dewi, A., Intan Wulan Dari, Y., Yuli Astuti, D., Aeni, N., Zainuri, M., Wulandari, N., Putri Gennosa, C., Adilla, W., Alaida Pratiwi, E., Yudha Pamungkas, F., & Saharuddin, E. (2023). Analisis dampak sosial ekonomi akibat relokasi pedagang kaki lima di Malioboro. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 1, 7–15.
- Putri Pratiwi, M., Ratna Sari, A., & Praditya, S. (2022). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(2), 56–63. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss2.art1>
- Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). *Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*. 1, 1–8.
- Sari, A. I. C., Karlina, E., & Rasam, F. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Dan Motivasi Berwirausaha Dalam Menumbuhkan Sikap Mental Kewirausahaan Peserta Didik. *Research and Development Journal of Education*, 7(2), 403. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10287>
- Sasoko, D. M., & Boangmanalu, J. Y. (2024). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Relokasi PKL Di Sekitar Station Klender Baru Dan Sekitarnya. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 24(1), 27–31.
- Setiaji, K., & Fatuniah, A. L. (2018). Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.21009/jpeb.006.1.1>
- Setiawan, A., Sundaro, H., & Sudrajat, A. S. E. (2022). Kajian Dampak Kebijakan Relokasi Pkl Bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pedagang. *Indonesian Journal of Spatial Planning*.
- Sianipar, R. M., Siregar, R. T., Manullang, M., Damanik, S. E., Pascasarjana, P., Simalungun, U., Ruang, P., Lima, P. K., & Aksara, P. (2020). Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 114.
- Supriatna, F. F. (2019). Relokasi Pedagang Kaki Lima: Strategi Coping dalam Meningkatkan Kualitas Pariwisata di Pantai Pangandaran. *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.14421/welfare.2019.081-02>
- Suryana. (2015). *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat Dan Proses Menuju Sukse*. Erlangga.
- Tasya, N. K., Nurasa, H., & Isnawaty, N. W. (2022). Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 372. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38232>
- Ulva, N., Fian, S., Hidayatullah, R., Amrullah, J., Putri, A., Ulum, K., Samsih, B., & Astono, T. (2024). Strategi Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Upaya Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2471–2482.
- Utomo, A. P., Mariana, N., Nugroho, I., Informasi, F. T., Semarang, U. S., Tri, J., Juang, L., & Mugas, N. (2022). Pendampingan Menumbuhkembangkan Wirausaha Bagi Karang Taruna Semarang Utara Dengan Kemampuan Proses Produksi Kain Ecoprint. *Ikraith-Abdimas*, 5(1), 167–171.
- Yadewani, D., Syafrani, & Ikhsan. (2020). *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*. Pustaka Galeri Mandiri.